KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

**Judul** : Dorong Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu: Fadli Cuma Bisa Andalkan Dukungan Fraksi Gerindra
**Tanggal** : Selasa, 30 April 2019
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka
**Halaman** : 7

Dorong Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu

# Fadli Cuma Bisa Andalkan Dukungan Fraksi Gerindra

**Wakil Ketua DPR Fadli Zon terus mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu. Namun, dia sadar, yang mendukung wacana ini belum banyak. Makanya, dia hanya mengandalkan dari Fraksi Gerindra.**

FADLI pede, Fraksi Gerindra akan bulat mendukung usulannya tersebut. "Saya kira, kalau Fraksi Gerindra sudah pasti setuju mengusut kecurangan-kecurangan ini," kata Fadli, di Kompleks Parlemen, Senayan. Jakarta, kemarin.

Mengusulkan sebuah Pansus di DPR sebenarnya tidak terlalu sulit. Usulan pembentukannya pansus cukup disampaikan 25 anggota Dewan dari dua fraksi atau lebih. Dengan syarat seperti ini, Fadli tidak akan kesulitan. Sebab, jumlah anggota Fraksi Gerindra saat ini sebanyak 73 orang.

Namun, untuk menggolkan usulan Pansus yang berat. Sebab, pembentukan itu harus disetujui mayoritas anggota dalam Sidang Paripurna DPR. Saat ini, jumlah anggota fraksi koalisi Pemerintah lebih banyak dibanding fraksi oposisi.

Fadli belum bicara masalah peluang itu. Dia masih konsentrasi untuk membenarkan usulannya. Dia pun membantah anggapan yang menyebut pembentukan Pansus akan menganggu kerja DPR periode ini dalam menuntaskan utang pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU).

"Itu dua hal yang berbeda. Menyelesaikan RUU itu adalah tugas legislasi, sedangkan Pansus adalah tugas pengawasan. Itu berbeda sekali," tegas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Dia mencoba meyakinkan publik, Pansus Kecurangan Pemilu samat penting. Kata dia, Pansus ini akan mengevaluasi kinerja dari penyelenggara Pemilu dan mengusut kecurangan-kecurangan selama ini.

"Saya kira ini bagian dari upaya memperbaiki ke depan. Tidak boleh di negara demokrasi ada kecurangan. (Nanti) demokrasi jadi tidak ada artinya ketika diisi kecurangan. Jadi, pura-pura demokrasi namanya," cetusnya.

Sebelumnya, Golkar, PPP, dan Nasdem, dengan tegas menolak usulan Fadli itu. Bahkan, ada anggota Fraksi PAN, yang merupakan bagian dari oposisi, juga menolak usulan Fadli.

"Daripada membicarakan hal tersebut (membentuk Pansus), lebih baik kita menyelesaikan sisa-sisa Rancangan Undang-Undang yang masih banyak. Daripada bikin Pansus soal kecurangan Pemilu yang sudah ada yang menangani," ujar anggota Fraksi Partai Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily.

Mantan aktivis Ciputat ini menekankan, mekanisme penanganan kecurangan diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Sudah ada lembaga yang berwenang menangani pelanggaran, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana Pemilu. Oleh karena itu, Pansus untuk mengusut kecurangan Pemilu tidak diperlukan.

Dari PPP, yang bicara mengenai ini adalah Wasekjen Achmad Baidowi. Anggota Komisi II DPR ini justru merasa lucu dengan wacana yang dilontarkan Fadli,

"Hasil Pemilu saja belum diketahui, kok sudah mau membentuk Pansus. Katanya sudah menang, kok masih mau bikin Pansus kecurangan?" ucapnya. Sebelumnya, Prabowo Subianto, capres nomor urut 02 yang didukung Fadli memang sudah mendeklarasikan kemenangan.

Fraksi Nasdem menganggap, pembentuk Pansus terlalu prematur. "Hasil Pemilu saja belum ada, masak bikin Pansus. Ini sangat prematurlah, gagasan seperti ini," ujar anggota Fraksi Nasdem Johnny G Plate.

Dari PAN, yang bicara penolakan ini adalah Wakil Ketua Umum Bara Hasibuan. Menurut Bara, Pansus bukan saluran yang telat untuk mempersoalkan pelaksanaan Pemilu 2019. "Sama sekali tidak ada relevansinya," tegasnya.

Bara juga tidak melihat ada kecurangan yang masif. "Seperti yang dikatakan Prof Mahfud, tidak ada kecurangan yang masif, terstruktur, dan bersifat nasional. Jadi tidak ada relevansinya," imbuhnya. ■ KAL